



# **PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)**

**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SINJAI**

**TAHUN 2017**

**INSPEKTORAT DAERAH**

**JL. JEND. SUDIRMAN NO. 8 KABUPATEN SINJAI**

**Telp. 0482 21337, Fax. 0482 21337**

**e-mail : [intkabsinjai@gmail.co.id](mailto:intkabsinjai@gmail.co.id)**

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
BAB II. EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II .....	7
BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA .....	11
BAB IV. PENUTUP .....	17

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunianya, sehingga penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Inspektorat Kabupaten Sinjai Tahun 2017 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja ( Renja ) ini berisikan rencana program dan rencana kegiatan yang dilaksanakan untuk tahun 2017 dan akan menjadi pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan tugas dibidang pengawasan untuk tahun 2017.

Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Rencana Kerja ini, untuk ini kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak .

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2017 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat Kabupaten Sinjai.

Sinjai, Mei 2016

**INSPEKTUR KABUPATEN**

**ASLAN ABBAS., SH., MH**

Pangkat : Pembina

NIP. 19631024 199703 1 002

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sitematika Penulisan.....	6
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU. ....</b>	<b>7</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun dan Capaian Renstra .....	7
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD .....	13
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ...	15
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	15
2.5 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	24
<b>BAB III TUJUAN, SARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>	<b>25</b>
3.1 Tujuan dan Saran Renja SKPD .....	25
3.2 Program dan Kegiatan .....	26
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>48</b>

## DAFTAR TABEL

2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016 Kabupaten Sinjai .....	8
2.2	Pencapaian Kinerja Inspektorat Kab. Sinjai .....	14
2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 Inspektorat Kabupaten Sinjai .....	16
3.1	Tabel Rencana Program / Kegiatan Inspektorat Kabupaten Sinjai Tahun 2017 .....	38

## BAB I

### P E N D A H U L U A N

#### 1.1. Latar Belakang

Dewasa ini kinerja Pemerintah Daerah semakin mendapat sorotan masyarakat. Pemerintah dituntut mampu untuk menunjukkan akuntabilitas kinerjanya kepada masyarakat sebagai *stakeholders*. Dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Perencanaan Strategis merupakan langkah awal untuk pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Perencanaan Strategis merupakan Integrasi atas semua sumber daya yang dimiliki dalam menjawab perkembangan dan perubahan lingkungan strategis. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma Kepemerintahan Yang Baik atau yang lebih dikenal dengan *Good Governance* yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya, yaitu : transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga pilar tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *Good Governance* dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan serta cita-cita bangsa.

Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

# RENJA INSPEKTORAT KAB. SINJAI 2017

## 1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Sinjai, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) <sup>2</sup>

## RENJA INSPEKTORAT KAB. SINJAI 2017

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

## RENJA INSPEKTORAT KAB. SINJAI 2017

- 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
  20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
  21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
  22. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten

## RENJA INSPEKTORAT KAB. SINJAI 2017

- Sinjai Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
24. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);
25. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 16 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58);
26. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 nomor );
27. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 1594 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013-2018 Inspektorat Kabupaten Sinjai.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Sinjai Tahun 2017 disusun dengan berpedoman kepada Perubahan Renstra Inspektorat dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD), memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja ( Renja ) Inspektorat Kabupaten Sinjai tahun 2017 disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA) Inspektorat Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2017. Renja juga merupakan acuan dalam penentuan pilihan - pilihan program kegiatan tahunan. Dokumen Renja ini juga disusun dengan tujuan sebagai barometer untuk mengukur dan melakukan

# RENJA INSPEKTORAT KAB. SINJAI 2017

evaluasi terhadap kinerja tahunan. Selain itu juga bertujuan untuk memudahkan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur.

## **1.4. Sistematika Penulisan**

### BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu & Capaian Renstra SKPD (Tabel 2.1)
- 2.2. Analisis kinerja pelayanan SKPD (Tabel 2.2)
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas & fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rencana Awal RKPD (Tabel 2.3)
- 2.5. Penelaahan usulan program & kegiatan

### BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan & Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

### BAB IV Penutup

# RENJA INSPEKTORAT KAB. SINJAI 2017

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra**

Evaluasi terhadap jalannya RENSTRA 2013-2018 dapat dilihat melalui perkembangan pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten selama satu tahun ketiga tahun 2016 dan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat Daerah berdasarkan program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun sebelumnya. Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi Renja tahun lalu 2015 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2016. Secara garis besar dapat dilihat dari table berikut ini :

# RENJA INSPEKTORAT KAB. SINJAI 2017

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016  
Tabel 2.1.  
Kabupaten Sinjai

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra SKPD	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2014 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2015 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2016)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2016		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
1	WAJIB										
1	Pemerintahan Umum										
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	Terlaksananya Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber daya Air, Listrik dan Internet	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Yang diurus perizinannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	75%	
1	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%	

RENJA INSPEKTORAT KAB. SINJAI 2017

[illegible]

## RENJA INSPEKTORAT KAB. SINJAI 2017

[illegible]

## RENJA INSPEKTORAT KAB. SINJAI 2017

[illegible]

## RENJA INSPEKTORAT KAB. SINJAI 2017

[illegible]

### 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah dan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 19 Tahun 2010 tentang pembentukan dan susunan Organisasi Inspektorat kabupaten Sinjai yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Oleh karena itu obyek (sasaran utama) Pelayanan Bidang Pengawasan Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Peningkatan Kapasitas dan Intensitas Pengawasan Internal melalui antara lain :

- a. Mengutamakan Pengawasan yang bersifat Pencegahan (Preventif) dengan mengedepankan pembinaan daripada tindakan;
  - b. Mengamankan setiap kebijakan Kepala daerah terutama terkait dengan Program-Program prioritas dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Konsultasi dan Solusi atas problematika penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah;
  - d. Pengawasan bersifat kuratif (Penanganan/tindakan) apabila upaya maksimal sudah tidak mencapai hasil;
  - e. Cepat tanggap, cepat temu dan cepat tuntas atas setiap permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- Capaian Kinerja Inspektorat Daerah di nilai berdasarkan Indikator Kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Sinjai no.566 tahun 2015. Analisis pencapaian kinerja tersebut disajikan dengan format sebagai berikut :

RENJA INSPEKTORAT KAB. SINJAI 2017

Tabel 2.2.  
Pencapaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Sinjai

No	Indikator	SPM/Standar	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis Tahun 2014
				Tahun 2015 (tahun n-2)	Tahun 2016 (tahun n-1)	Tahun 2017 (tahun n)	Tahun 2018 (tahun n+1)	Tahun 2015 (tahun n-2)	Tahun 2016 (tahun n-1)	Tahun 2017 (tahun n)	Tahun 2018 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Pengelolaan manajemen SKPD			42 SKPD	42 SKPD	42 SKPD	42 SKPD	42 SKPD	42 SKPD	42 SKPD	42 SKPD	Realisasi mencapai target 100%
2	Penanganan Kasus pengaduan masyarakat			100%	100%	100%	100%	100%	40%	100%	100%	Realisasi mencapai target 100%
3	Meningkatnya tindak lanjut temuan hasil pengawasan Inspektorat kabupaten Sinjai			76%	77%	78%	79%	100%	100%	100%	100%	Realisasi mencapai target 100%
4	Bertambahnya aparat pengawasan yang bersertifikasi sesuai jenjang pendidikannya			6 orang	5 orang	3 orang	2 orang	100%	100%	100%	100%	Realisasi mencapai target 100%

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Inspektorat, maka dapat dirumuskan isu – isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat.

Perumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Inspektorat.

Isu – isu strategis yang dihadapi dilihat dari faktor internal adalah ***terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM yang memadai***, sedangkan dari faktor eksternal adalah ***masih lemahnya pengendalian intern dari masing – masing unit kerja***.

### 2.4. Review terhadap rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Sinjai diselaraskan dengan Rencana Program dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 yaitu Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala, inventarisasi temuan pengawasan (gelar pengawasan) dan tindak lanjut hasil temuan pengawasan, Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas dengan kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. Anggaran disesuaikan dengan plafon pagu indikatif yang ada pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

# RENJA INSPEKTORAT KAB. SINJAI 2017

Tabel 2.3.  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2015  
Inspektorat kabupaten Sinjai

			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Kode			Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			WAJIB										
1	20		Pemerintahan Umum										
1	20.12	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	Kec. Sinjai Utara	Terlaksananya Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber daya Air, Listrik dan Internet	12 bulan	49.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	Kec. Sinjai Utara	Terlaksananya Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber daya Air, Listrik dan Internet	12 bulan	49.500.000	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Kendaraan Dinas Yang diurus perizinannya	100%	9.790.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Kendaraan Dinas Yang diurus perizinannya	100%	9.790.000	

# RENJA INSPEKTORAT KAB. SINJAI 2017

	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kec. Sinjai Utara	Terlaksananya Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	11.209.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kec. Sinjai Utara	Terlaksananya Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	11.209.000	
	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Sinjai Utara	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	1.601.600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Sinjai Utara	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	1.601.600	
	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Sinjai Utara	Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	15.660.568	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Sinjai Utara	Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	15.660.568	
	19	Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	Kec. Sinjai Utara	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	12 bulan	127.674.250	Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	Kec. Sinjai Utara	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	12 bulan	127.674.250	
	20	Pengelolaan Keuangan SKPD	Kec. Sinjai Utara	Terlaksananya penyediaan jasa Pengelola Keuangan Daerah	12 bulan	71.993.790	Pengelolaan Keuangan SKPD	Kec. Sinjai Utara	Terlaksananya penyediaan jasa Pengelola Keuangan Daerah	12 bulan	71.993.790	
	22	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Dalam dan Luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan Luar Daerah	12 bulan	228.585.500	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Dalam dan Luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan Luar Daerah	12 bulan	228.585.500	

## RENJA INSPEKTORAT KAB. SINJAI 2017

			Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Pegawai yang dilayani administrasi kepegawaiannya	27 orang	12.322.750	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Pegawai yang dilayani administrasi kepegawaiannya	27 orang	12.322.750
1	20.12	02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>					<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>				
		07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan	100%	15.400.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan	100%	15.400.000
		09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Peralatan Gedung kantor yang diadakan	100%	55.550.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Peralatan Gedung kantor yang diadakan	100%	55.550.000
		10	Pengadaan Mebeleur	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Mebeleur yang diadakan	100%	14.630.000	Pengadaan Mebeleur	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Mebeleur yang diadakan	100%	14.630.000
		22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Gedung yang dipelihara	100%	4.062.850	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Gedung yang dipelihara	100%	4.062.850
		24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	25 unit	66.616.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	25 unit	66.616.000
												Mengalami pengeseran/penurunan anggaran sebesar Rp 60.000.000 untuk menutupi biaya pemeriksaan yang terbatas

## RENJA INSPEKTORAT KAB. SINJAI 2017

				Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Sinjai Utara	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	2.850.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Sinjai Utara	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	2.850.000		
			26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kec. Sinjai Utara	Terlaksananya penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 bulan	10.917.500	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kec. Sinjai Utara	Terlaksananya penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 bulan	10.917.500		
			28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Kec. Sinjai Utara	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	100%	2.829.750	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Kec. Sinjai Utara	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	100%	2.829.750		
1	20.12	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR					PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR						
			01	Pengadaan Mesin/kartu Absensi	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan		-	Pengadaan Mesin/kartu Absensi	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan	1 paket	-		
			02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Aparat yang mendapatkan Pakaian Dinas	28 Orang	15.456.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Aparat yang mendapatkan Pakaian Dinas	28 Orang	15.456.000		
1	20.12	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						

# RENJA INSPEKTORAT KAB. SINJAI 2017

			01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dalam dan Luar daerah	Jumlah Tenaga Pemeriksa yang mengikuti pelatihan dan pengembangan dan penilaian Akntabilitas Kinerja	27 orang	531.531.140	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dalam dan Luar daerah	Jumlah Tenaga Pemeriksa yang mengikuti pelatihan dan pengembangan dan penilaian Akntabilitas Kinerja	27 orang	531.531.140	Mengalami pengeseran/ penurunan anggaran sebesar Rp 94.848.000 untuk menutupi biaya pemeriksaan yang terbatas
1	20.12	06		<b>PROGRAM Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja DAN KEUANGAN</b>					<b>PROGRAM Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja DAN KEUANGAN</b>					
			04	Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Laporan Keuangan Tahun yang Disusun	1 dokumen	5.581.125	Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Laporan Keuangan Tahun yang Disusun	1 dokumen	5.581.125	
			06	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang Disusun	1 dokumen	6.265.050	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang Disusun	1 dokumen	6.265.050	
			09	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang Disusun	5 dokumen	23.287.550	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang Disusun	5 dokumen	23.287.550	

# RENJA INSPEKTORAT KAB. SINJAI 2017

	20.12	20	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH						PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH					
			01	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	9 Kec. Di Kab. Sinjai	Persentase pengawasan internal Pemda berkala	100%	1.575.221.780	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	9 Kec. Di Kab. Sinjai	Persentase pengawasan internal Pemda berkala	100%	1.575.221.780	kegiatan seperti reviu SKPD tidak bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran
			02	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan pemerintah daerah	9 Kec. Di Kab. Sinjai	Persentase penanganan kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	126.634.900	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan pemerintah daerah	9 Kec. Di Kab. Sinjai	Persentase penanganan kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	126.634.900	Mengalami pergeseran/ penurunan anggaran sebesar Rp 38.250.000 untuk menutupi biaya pemeriksaan yang terbatas
			06	Tindak Lanjut hasil temuan Pengawasan	9 Kec. Di Kab. Sinjai	Persentase Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan	77%	155.678.375	Tindak Lanjut hasil temuan Pengawasan	9 Kec. Di Kab. Sinjai	Persentase Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan	75%	155.678.375	

## RENJA INSPEKTORAT KAB. SINJAI 2017

[illegible]

## RENJA INSPEKTORAT KAB. SINJAI 2017

[illegible]

## RENJA INSPEKTORAT KAB. SINJAI 2017

### **2.5. Penelaahan usulan program dan Kegiatan masyarakat**

Pada saat pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2016 tidak ada usulan yang berkaitan langsung dengan Inspektorat, namun program yang dilaksanakan tetap mengacu pada prioritas yang telah dicanangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2017 disusun dengan mengakomodir usulan-usulan program dan kegiatan dari seluruh Inspektur Pembantu I s/d IV kemudian dilakukan penyelarasan pada sekretariat untuk seterusnya disusun menjadi Rencana Kerja Inspektorat.

Usulan program dan kegiatan dari sekretaris yang mengakomodir seluruh kepentingan inspektur pembantu (irban) kemudian disusun menjadi program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Sinjai. Program dan kegiatan Inspektorat yang ditetapkan dimaksudkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dan Lembaga Lain Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai.

# RENJA INSPEKTORAT KAB. SINJAI 2017

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan nasional harus bersifat terpadu, menyeluruh, sistematis dan tanggap terhadap perkembangan jaman yang terdiri dari RPJP Nasional 20 Tahunan, RPJM Nasional 5 Tahunan dan Renja Pemerintah Tahunan Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 merupakan implementasi dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 dan RPJM Nasional Tahun 2015-2019 dengan memperhatikan segala potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh Kabupaten Sinjai. RPJMD Kabupaten Sinjai merupakan pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Renstra SKPD dan RKPD Kabupaten Sinjai Tahunan. RKPD merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2017, sedangkan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 tahun yang merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan prakiraan maju.

#### 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, haruslah didukung dengan tujuan dan sasaran yang mengacu pada pernyataan visi dan misi.

## RENJA INSPEKTORAT KAB. SINJAI 2017

Adapun Tujuan Rencana Kerja sesuai dengan tujuan pada Renstra yang telah dibuat Inspektorat Kabupaten Sinjai :

- a. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa serta pelayanan publik yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat.
- b. Meningkatnya kapasitas aparatur pengawasan intern pemerintah yang kompeten dan profesional

Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik dan terukur dalam waktu satu tahunan maka Inspektorat Kabupaten Sinjai menjabarkannya dalam suatu sasaran sesuai dengan Renstra, yang mencakup :

- a. Meningkatnya pengelolaan manajemen Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Pelayanan Publik kepada semua lapisan masyarakat;
- c. Meningkatnya opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai;
- d. Meningkatnya predikat penilaian akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai;
- e. Penanganan kasus pengaduan masyarakat;
- f. Meningkatnya tindak lanjut temuan hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten Sinjai; dan
- g. Bertambahnya aparat pengawasan yang bersertifikasi sesuai jenjang pendidikannya.

### **3.2. Program dan Kegiatan**

Berpedoman pada Program dan Kegiatan pada Renstra yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Sinjai tersebut, maka Tahun 2017 menetapkan Program Utama, sesuai dengan penjelasan dibawah ini, yaitu :

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut :

## RENJA INSPEKTORAT KAB. SINJAI 2017

### a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Kegiatan ini merupakan bagian dari proses manajemen pemerintahan yang juga merupakan urusan wajib bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pengawasan internal di daerah yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sinjai. Pemeriksaan ini sangat dibutuhkan untuk mendukung tercapainya peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah. Dengan kegiatan pemeriksaan ke SKPD yang dilaksanakan secara periodik, diharapkan akan mengurangi kesalahan manajemen di tingkat SKPD, dimana temuan hasil pemeriksaan dapat segera ditindaklanjuti sehingga tidak akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi kinerja SKPD. Pemeriksaan Internal secara berkala/reguler berpedoman pada Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT), dilaksanakan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi, penyelenggaraan kegiatan instansi, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang daerah, pengelolaan sumber daya manusia. Pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Untuk Kegiatan pengawasan internal secara berkala Tahun 2017, pemeriksaan yang dilakukan terdiri atas :

#### 1) Review LKPD

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor : PER-44/PB/2006 " Reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan dan analitik yang harus menjadi dasar bagi Aparat Pengawasan Internal untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)". Inspektorat hanya melakukan penelusuran kesesuaian angka-angka yang disajikan dalam Laporan Keuangan

## RENJA INSPEKTORAT KAB. SINJAI 2017

Daerah yang telah disusun oleh BPKAD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan tidak melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap bukti fisik sebagaimana dilakukan dalam proses audit. Sasaran Reviu adalah untuk laporan keuangan yang disajikan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), laporan keuangan dimaksud mencakup Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pelaksanaan Reviu LKPD Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali.

### 2) Pemeriksaan Belanja Modal

Pemeriksaan belanja modal untuk fasilitas umum merupakan kompilasi dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Secara umum kasus penyimpangan ketentuan perundang-undangan belanja modal untuk fasilitas umum, antara lain terjadi karena kelalaian rekanan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian dalam kontrak, selain itu adanya ketidakcermatan konsultan pengawas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan panitia pengadaan barang dalam melaksanakan tugasnya, serta kelemahan pengawasan dan pengendalian dari pejabat/pimpinan entitas. Berdasarkan fakta-fakta tersebut sehingga Inspektorat pada tahun 2017 akan melakukan pemeriksaan belanja modal terhadap proyek-proyek fisik yang telah dilaksanakan sebelumnya.

### 3) Evaluasi Dokumen Perencanaan Belanja Modal

Pemeriksaan ditujukan untuk menilai apakah administrasi pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja modal telah sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan belanja modal.

### 4) Pemeriksaan Kecamatan/Desa dan Kelurahan

## RENJA INSPEKTORAT KAB. SINJAI 2017

Melaksanakan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dijelaskan APBDes harus dikelola berdasarkan azas-azas transparansi, akuntabel, partisipatif dan tertib anggaran, Inspektorat selaku pengawas internal harus memeriksa kegiatan tersebut. Sasaran pemeriksaan APBDes tahun 2017 sebanyak 52 Desa di 9 Kecamatan

### 5) Pemeriksaan Sekolah (Dana Pendidikan)

Pada tahun 2017 Inspektorat kabupaten Sinjai akan melakukan audit pemamfaatan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) untuk memastikan bahwa dana BOS benar-benar dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan peruntukannya. Sasaran pemeriksaan adalah sekolah SD, SMP, dan SMA/SMK di Kabupaten Sinjai.

### 6) Pemeriksaan SKPD

Pada kegiatan tersebut dilakukan pemantauan pengelolaan keuangan oleh bendahara, yaitu memberikan arahan tentang penyeteroran sisa kas pada akhir tahun tidak melewati batas yang telah ditentukan; melakukan pemeriksaan dan penghitungan sisa barang persediaan; serta melaksanakan pemeriksaan kas baik kas bendahara pengeluaran maupun kas yang ada pada bendahara penerimaan SKPD.

Hasil dari pelaksanaan pemeriksaan dimaksud adalah tersedianya data yang telah tervalidasi baik berupa nilai barang persediaan dan kondisi pengelolaan keuangan sebagai dasar informasi aset lancar dalam penyusunan Neraca pada Laporan Keuangan SKPD. Selain itu, kegiatan pemeriksaan SKPD dimaksud adalah dalam rangka rekonsiliasi internal penyusunan laporan keuangan SKPD, yakni dalam hal ini Inspektorat meelaksanakan reviu terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA), pertanggungjawaban

## RENJA INSPEKTORAT KAB. SINJAI 2017

fungsional bendahara, rekening koran dan sisa kas pada setiap SKPD.

### 7) Pemeriksaan Khusus

- Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Mengevaluasi kesesuaian yang ada pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pada Tahun Anggaran 2017 Inspektorat kabupaten Sinjai mengevaluasi sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Fasilitasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) masa akhir Kepala Desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka memberikan pembinaan kepada Kepala Desa yang akan mengakhiri masa jabatannya agar di dalam membuat LPPD dan LKPJ sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Selain itu tujuan diadakannya kegiatan fasilitasi ini adalah memberikan pembinaan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya untuk mengamankan aset pemerintah daerah yang ada di desa. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 52 desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa yang tersebar di 9 Kecamatan.

- Gugatan Cerai dalam Rumah Tangga

## RENJA INSPEKTORAT KAB. SINJAI 2017

Kasus gugat cerai dikalangan pegawai negeri sipil (PNS) di Pemkab Sinjai yang sudah menjadi tradisi dan trend bagi kalangan PNS terbilang cukup tinggi dan signifikan, terlihat dalam pengawasan laporan yang masuk.

### ➤ Penilaian Tingkat Maturitas SPIP

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pokok pembangunan nasional, penguatan kerangka kelembagaan pemerintah akan difokuskan untuk mendukung pencapaian agenda prioritas pemerintah yang tertuang dalam NAWA CITA yakni, Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dengan mengoptimalisasikan keberadaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sehingga dapat berperan sebagai garda depan dalam upaya pencegahan korupsi di internal Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

### ➤ RKA

Reviu RKA-SKPD bertujuan untuk menganalisis/mengukur kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan; kaitan logis antara program/kegiatan yang diusulkan dengan strategi dan prioritas APBD; Kesesuaian antara program/kegiatan yang diusulkan dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja yang bersangkutan; kapasitas satuan kerja untuk melaksanakan program/kegiatan pada tingkat pencapaian yang diinginkan dan dalam jangka waktu satu tahun anggaran; Kaitan antara biaya yang dianggarkan dengan target pencapaian kinerja (standar biaya); Kaitan antara standar biaya dengan harga yang berlaku; Kaitan antara biaya yang dianggarkan, target pencapaian dengan sumber dana.

## RENJA INSPEKTORAT KAB. SINJAI 2017

### ➤ Pemeriksaan Dana Hibah

Tujuan dari pemeriksaan ini untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan atas dana bantuan hibah dan bansos yang telah diberikan oleh pihak Pemkab. Bantuan yang diberikan itu pemanfaatannya sudah sesuai atau tidak dengan apa yang diajukan oleh pihak penerima.

### 8) Ekspose eksternal Hasil Pengawasan

Kegiatan Inspektorat Kabupaten Sinjai untuk memaparkan hasil pemeriksaan atas temuan-temuan yang dilakukan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai pada tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2017 berjalan yang diharapkan tahun anggaran berikutnya tidak terulang kembali dengan temuan yang sama.

### 9) Pengendalian Gratifikasi

Gratifikasi menurut penjelasan pasal 128 UU No. 26 Tahun 2001 yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 128 ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Gratifikasi wajib dilaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi tersebut Inspektorat Kabupaten Sinjai paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya peristiwa gratifikasi tersebut.

## RENJA INSPEKTORAT KAB. SINJAI 2017

### 10) Monitoring Percepatan Penyerapan Anggaran Pengadaan Belanja Barang dan Jasa

Dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan pemerintah, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, maka Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015, agar setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada setiap tahun anggaran dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka merespon arahan Presiden untuk percepatan penyerapan anggaran dan sebagai tindak lanjut rapat koordinasi Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada tanggal 23 maret 2016, maka APIP Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan reuiu penyerapan anggaran, PBJ, serta penyaluran dan penggunaan Dana Desa dengan lingkup reuiu reaalisasi anggaran (penyerapan anggaran) triwulanan atas belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial serta penyaluran dan penggunaan Dana Desa dan proses PBJ triwulanan yang dibiayai dengan belanja barang dan belanja modal yang dilakukan melalui pelelangan.

#### b. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah daerah

Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah berupaya mewujudkan ketepatan pelayanan pengusutan kebenaran laporan pengaduan masyarakat. Namun selain didasarkan atas laporan / aduan masyarakat, pemeriksaan kasus juga didasarkan

pada pemberitaan media massa, pengembangan dari hasil pemeriksaan reguler / khusus maupun perintah Bupati. Dengan pemeriksaan kasus, maka akan diperoleh ketetapan mengenai kebenaran maupun ketidakbenaran terhadap indikasi adanya penyimpangan yang terjadi, sehingga akan diperoleh rekomendasi yang obyektif sebagai bahan pengambilan kebijakan Bupati terhadap penanganan kasus yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai.

Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah daerah menghasilkan Temuan dan Rekomendasi dengan Keluaran berupa Jumlah Penanganan kasus pengaduan sebanyak 10 Obyek Pemeriksaan. Sedangkan dampak dari kegiatan tersebut adalah penyelesaian kasus pengaduan sebanyak 10 obyek pemeriksaan.

### c. Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Kegiatan penanganan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan merupakan upaya untuk menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, baik pemeriksaan internal (Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai) maupun pemeriksaan eksternal (Inspektorat Provinsi, BPKP, BPK, Itjen Kemendagri maupun Itjen Kementerian teknis lainnya). Dari proses penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan tersebut maka bisa dilihat komitmen pimpinan SKPD terhadap hasil pemeriksaan dan arti pentingnya kegiatan pemeriksaan bagi peningkatan kinerja SKPD. Disamping itu, dengan adanya batasan waktu penyelesaian temuan hasil pemeriksaan BPK yaitu 60 hari kerja setelah LHP diterima, maka perlu dilakukan koordinasi intensif dalam rangka penanganan dan penyelesaian tindak lanjut tersebut sehingga bisa diselesaikan sebelum batas waktu yang ditentukan.

Melalui kegiatan Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan dapat diketahui perkembangan realisasi penyelesaian rekomendasi aparat

## RENJA INSPEKTORAT KAB. SINJAI 2017

pengawasan internal dan eksternal dengan keluaran berupa jumlah pemantauan tindak lanjut rekomendasi LHP aparat pengawasan internal dan eksternal sebanyak 12 dokumen. Dampak dari kegiatan tersebut adalah berupa temuan hasil pemeriksaan aparat fungsional selama 12 bulan.

### 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

#### a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Dengan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Diharapkan mampu menambah wawasan para aparatur pemeriksa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga ruang lingkup pengawasan tidak hanya terkait pada aspek keuangan saja namun aspek-aspek lain juga perlu dilakukan pengawasan antara lain administrasi, urusan pemerintahan serta pengawasan lainnya.

**Diklat** Teknis Pengawasan dan Penilaian akuntabilitas kinerja memberikan ketrampilan dan/atau penguasaan pengetahuan teknis yang berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan tugas pokok pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat kabupaten sinjai. Diklat teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pengawasan.

#### b. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)

PKS diperuntukkan bagi Pegawai Inspektorat Kabupaten Sinjai, namun tidak menutup kemungkinan untuk dihadiri oleh pihak eksternal dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang peran, karier, kinerja, kompetensi, kapabilitas APIP dan semakin terarah dan mantap dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Diharapkan juga didapat solusi mengenai permasalahan-

## RENJA INSPEKTORAT KAB. SINJAI 2017

permasalahan mengenai penilaian angka kredit (PAK) baik di Tim Penilai Angka Kredit maupun di BKD.

### 3. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

#### a. Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Auditor yang merupakan penilaian prestasi kerja sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan, kenaikan jabatan dan/atau pangkat. Penilaian prestasi dan kinerja Auditor antara lain dilakukan dengan mekanisme pemberian angka kredit dengan memperhitungkan setiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan penugasan yang dilaksanakan. Masing-masing kegiatan penugasan dinilai dengan satuan angka kredit sesuai dengan kompleksitas kegiatan dan jenjang jabatan Auditor.

#### b. Forum koordinasi percepatan, pencegahan dan pemberantasan KKN di Kab. Sinjai

Merupakan kegiatan dalam rangka melaksanakan diktum kesebelas angka 4 huruf e Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dimana salah satu bentuk kegiatannya meliputi 3 obyek : 1. Pelaksanaan 10 (sepuluh) Diktum Instruksi Umum oleh semua Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah; 2. Pelaksanaan 11 (sebelas) Instruksi Khusus oleh beberapa Instansi Pemerintah yang ditugasi secara khusus; 3. Pelaksanaan butir-butir rencana aksi yang terdapat di Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK).

### 4. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

## RENJA INSPEKTORAT KAB. SINJAI 2017

- a. Laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

Sesuai Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Ketidakpatuhan Terhadap Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), maka APIP Inspektorat ditugaskan untuk memonitor, berkoordinasi, melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada wajib lapor jika terdapat indikasi ketidakwajaran.

# RENJA INSPEKTORAT KAB. SINJAI 2017

TABEL 3.1

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN INSPEKTORAT KABUPATEN SINJAI TAHUN 2017														
KODE REK.	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	PRIOR ITAS DAER AH	SASARA N PEMBAN GUNAN DARAH	LOKA SI	INDIKATOR KINERJA					PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENI S PRO G & KEG	SKPD PENAGGUN G JAWAB	
					PROGRAM/ OUTCOME		KEGIATAN/ OUTPUT							
					TOLAK UKUR	TAR GET	TOLAK UKUR	TARG ET						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
1	20	7	20		9 Kecam atan di kabup aten Sinjai	% Rekomendasi tindak lanjut LHP yang berhasil diimplementasi kan dan tidak berulang	77%			2.830.053.810	3.113.059.191	1	Inspektorat Kabupaten	
1	20	7	20	1				Prosentase pengawasan internal lingkup Pemda secara berkala	100%	1.575.221.780	1.732.743.958	1	Inspektorat Kabupaten	
					9 Kecam atan di kabup aten Sinjai			Jumlah SKPD yang diperiksa	42 SKPD	117.810.000	129.591.000	1	Inspektorat Kabupaten	
					9 Kecam atan di Kabup aten Sinjai			Jumlah SKPD yang direview	42 SKPD	512.820.000	564.102.000	1	Inspektorat Kabupaten	

## RENJA INSPEKTORAT KAB. SINJAI 2017

									Jumlah Laporan Keuangan SKPD dan Pemda yang direview	42 LHR SKPD + LHR Pemda	83.875.000	92.262.500	1	Inspektorat Kabupaten
								Kecamatan di Kabupaten Sinjai	Jumlah SKPD yang diawasi atas penyerahan anggaran SKPD	42 SKPD	58.905.770	64.796.347	1	Inspektorat Kabupaten
								Kecamatan Sinjai Utara	Jumlah SKPD yang diawasi kas akhir tahun	42 SKPD	58.905.770	64.796.347	1	Inspektorat Kabupaten
								9 Kecamatan di Kabupaten Sinjai	jumlah SKPD yang dievaluasi dokumen perencanaan nya	42 SKPD	36.036.000	39.639.600	1	Inspektorat Kabupaten
								9 Kecamatan atan di Kabupaten Sinjai	Jumlah SKPD yang diperiksa belanja modalnya	42 SKPD	176.717.310	194.389.041	1	Inspektorat Kabupaten
								9 Kecamatan atan di Kabupaten Sinjai	Jumlah SKPD yang diawasi, dimonitoring dan dievaluasi dalam pelayanan publik	42 SKPD	58.905.770	64.796.347	1	Inspektorat Kabupaten

## RENJA INSPEKTORAT KAB. SINJAI 2017

							Pemeriksaan, Monitoring dan Evaluasi Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah				9 Kecam atan di Kabup aten Sinjai			Jumlah SKPD yang diawasi, dimonitoring dan evaluasi dalam optimalisasi penerimaan asli daerah	11 SKPD	58.905.770	64.796.347	1	Inspektorat Kabupaten
							• Pemeriksaan Desa				9 Kecam atan di Kabup aten Sinjai			Jumlah desa yang diperiksa	67 Desa	117.811.540	129.592.694	1	Inspektorat Kabupaten
							• Pemeriksaan puskesmas				9 Kecam atan di Kabup aten Sinjai			Jumlah puskesmas yang diperiksa	16 Puskes mas	58.905.770	64.796.347	1	Inspektorat Kabupaten
							• Pendampingan SKPD				9 Kecam atan di Kabup aten Sinjai			Jumlah SKPD yang didampingi	42 SKPD	58.905.770	64.796.347	1	Inspektorat Kabupaten
							• Pemeriksaan Dana Bos Sekolah (SD,SMP,SMA)				9 Kecam atan di Kabup aten Sinjai			Jumlah SD, SMP, SMA/SMK yang diperiksa	242 SD, 46 SMP, 14 SMA/S MK	117.811.540	129.592.694	1	Inspektorat Kabupaten
							Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Evaluasi AKIP)				9 Kecam atan di Kabup aten Sinjai			Jumlah SKPD yang dievaluasi AKIB	42 SKPD	58.905.770	64.796.347	1	Inspektorat Kabupaten
							• Monitoring Percepatan Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa				9 Kecam atan di Kabup aten Sinjai			Jumlah SKPD dan desa yang dimonitoring	42 SKPD + 67 Desa	151.200.000	166.320.000	3	Inspektorat Kabupaten

# RENJA INSPEKTORAT KAB. SINJAI 2017

1	20	7	20	2	Penanganan Kasus Pengaduan Di lingkungan Pemerintah Daerah			9 Kecamatan di Kabupaten Sinjai			Persentase penanganan kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	145.630.135	160.193.149	1	Inspektorat Kabupaten
1	20	7	20	5	Inventarisasi Temuan Pengawasan			9 Kecamatan di Kabupaten Sinjai			Peresentase Investasi temuan hasil pengawasan	100%	40.447.000	44.491.700	1	Inspektorat Kabupaten
1	20	7	20	6	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan (Internal & Eksternal)			9 Kecamatan di Kabupaten Sinjai			Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	77%	155.678.375	171.246.213	1	Inspektorat Kabupaten
1	20	7	20	7	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif			9 Kecamatan di Kabupaten Sinjai			Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi hasil pengawasan	12 Bulan	464.375.520	510.813.072	1	Inspektorat Kabupaten
1	20	7	20	10	Pemeriksaan khusus			9 Kecamatan di Kabupaten Sinjai			Persentase jumlah pemeriksaan khusus yang ditangani	100%	406.749.000	447.423.900	1	Inspektorat Kabupaten
1	20	7	20	11	Ekspose Eksternal Temuan Hasil Pemeriksaan			Kec. Sinjai Utara			Jumlah pelaksanaan Ekspose Pemeriksaan	2 kali	41.952.000	46.147.200	1	Inspektorat Kabupaten
1	20	7	21		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Dalam dan Luar Daerah		Persentase APIP yang tersertifikasi	100 %	569.547.140	626.501.854	1	Inspektorat Kabupaten	



# RENJA INSPEKTORAT KAB. SINJAI 2017

1	20	7	22	3	Forum Koordinasi Percepatan, Pencegahan dan Pemberantasan KKN di Kab Sinjai		Kab Sinjai			Terlaksananya Forum Koordinasi Percepatan, Pencegahan dan Pemberantasan KKN di Kab. Sinjai	1 kali	54.450.000	59.895.000	1	Inspektorat Kabupaten
1	20	7	22	6	Pengendalian Gratifikasi		9 Kecamatan di Kab. Sinjai			Berfungsinya unit pengendalian Gratifikasi	1 tahun	70.000.000	77.000.000	3	Inspektorat Kabupaten
1	20	12	1		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		Kab Sinjai	Cakupan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %			528.337.458	581.171.204	1	Inspektorat Kabupaten
1	20	12	1	2	Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, dan internet		Kec. Sinjai Utara			Terlaksananya penyediaan jasa telekomunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	12 bulan	49.500.000	54.450.000	1	Inspektorat Kabupaten
1	20	12	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		Kec. Sinjai Utara			Jumlah kendaraan dinas yang diurus perizinannya	26 unit	9.790.000	10.769.000	1	Inspektorat Kabupaten
1	20	12	1	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Kec. Sinjai Utara			terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	11.209.000	12.329.900	1	Inspektorat Kabupaten

# RENJA INSPEKTORAT KAB. SINJAI 2017

1	20	12	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Sinjai Utara		Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	1.601.600	1.761.760	1	Inspektorat Kabupaten
1	20	12	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan			Kec. Sinjai Utara		Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	15.660.568	17.226.625	1	Inspektorat Kabupaten
1	20	12	1	19	Pelayanan administrasi Kesekretariatan			Kec. Sinjai Utara		Terlaksananya Pelayanan administrasi Kesekretariatan	12 bulan	127.674.250	140.441.675	1	Inspektorat Kabupaten
1	20	12	1	20	Penyediaan Jasa Pengolah Data Keuangan Daerah			Kec. Sinjai Utara		Terlaksananya Penyediaan Jasa Pengolah Data Keuangan Daerah	12 bulan	71.993.790	79.193.169	1	Inspektorat Kabupaten
1	20	12	1	22	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			Dalam Sinjai Luara Daerah		Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	12 bulan	228.585.500	251.444.050	1	Inspektorat Kabupaten

# RENJA INSPEKTORAT KAB. SINJAI 2017

1	20	12	1	23	Pelayanan Administrasi Kepegawaian				Kec. Sinjai Utara			Jumlah pegawai yang dilayani administrasi kepegawaian	29 orang	12.322.750	13.555.025	1	Inspektorat Kabupaten
1	20	12	2		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				Kab Sinjai	Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	100 %			270.006.100	297.006.710	1	Inspektorat Kabupaten
1	20	12	2	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional				Kab Sinjai			Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	4 unit	80.000.000	88.000.000	1	Inspektorat Kabupaten
1	20	12	2	7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				Kab Sinjai			Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	2 unit	15.400.000	16.940.000	1	Inspektorat Kabupaten
1	20	12	2	9	Pengadaan Peralatan gedung Kantor				Kab Sinjai			Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	11 unit	45.500.000	50.050.000	1	Inspektorat Kabupaten
1	20	12	2	10	Pengadaan Mebeleur				Kab Sinjai			Jumlah Mebeleur yang diadakan	14 unit	38.000.000	41.800.000	1	Inspektorat Kabupaten
1	20	12	2	22	Peneliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				Kec. Sinjai Utara			Jumlah gedung yang dipelihara	unit	4.062.850	4.469.135	1	Inspektorat Kabupaten
1	20	12	2	24	Peneliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor				Kec. Sinjai Utara			Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan gedung kantor	12 bulan	10.917.500	12.009.250	1	Inspektorat Kabupaten
1	20	12	2	25	Peneliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				Kec. Sinjai Utara			Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	unit	66.616.000	73.277.600	1	Inspektorat Kabupaten

# RENJA INSPEKTORAT KAB. SINJAI 2017

1	20	12	2	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur		Kec. Sinjai Utara			Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur	12 bulan	2.829.750	3.112.725	1	Inspektorat Kabupaten
1	20	12	6		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan</b>		Kec. Sinjai Utara	Opini Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja SKPD	B			40.714.850	44.786.335	1	Inspektorat Kabupaten
1	20	12	6	1	Penyusunan Laporan Keuangan Semester		Kec. Sinjai Utara			Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang disusun	1 dokumen	5.581.125	6.139.238	1	Inspektorat Kabupaten
1	20	12	6	4	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		Kec. Sinjai Utara			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 dokumen	5.581.125	6.139.238	1	Inspektorat Kabupaten
1	20	12	6	6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kec. Sinjai Utara			Jumlah Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang disusun	1 dokumen	9.382.500	10.320.750	1	Inspektorat Kabupaten
1	20	12	6	9	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD		Kec. Sinjai Utara			Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang disusun	7 dokumen	48.012.500	52.813.750	1	Inspektorat Kabupaten
1	20	12	3		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		Kec. Sinjai Utara	Presentase PNS yang memenuhi standar kedisiplinan	100 %			92.405.000	101.645.500	1	Inspektorat Kabupaten

# RENJA INSPEKTORAT KAB. SINJAI 2017

1	20	12	3	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			Kec. Sinjai Utara			Jumlah Aparat yang mendapatkan Pakaian Dinas	29 orang	15.456.000	17.001.600	1	Inspektorat Kabupaten
1	20	12	26		<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>			Kec. Sinjai Utara	Prosentase penyelenggara negara yang mengisi LHKPN/LHKS	100 orang			38.474.500	42.321.950	1	Inspektorat Kabupaten
1	20	12	26	7	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara (LHKPN/LHKS)			Kec. Sinjai Utara			Jumlah penyelenggara negara yang mengisi laporan harta kekayaan dan laporan harta kekayaan ASN	100 orang	38.474.500	42.321.950	1	Inspektorat Kabupaten

# RENJA INSPEKTORAT KAB. SINJAI 2017

## BAB IV

### P E N U T U P

Untuk menjamin agar kegiatan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka sebuah sistem perencanaan yang baik merupakan syarat mutlak untuk tercapainya tujuan. Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten merupakan bagian dari rencana kerja tahunan yang menggambarkan prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten dan dijabarkan ke dalam program dan kegiatan pokok pembangunan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Adapun prioritas pembangunan tahunan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten sinjai adalah berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran - sasaran pembangunan.
2. Memiliki sasaran - sasaran dan indikator kinerja yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya.
3. Kegiatan tersebut sifatnya mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan.
4. Realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun.

Renja tahun 2017 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA- SKPD) yang selanjutnya menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Beberapa harapan dengan adanya Renja 2017, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program dan kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta terkordinasi sesuai dengan tujuan dan sasaran berikut berbagai indikator yang telah ditetapkan.
2. Mampu memberikan arahan bagi pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan Program dan Kegiatan di Inspektorat Kabupaten.

## RENJA INSPEKTORAT KAB. SINJAI 2017

3. Mengakomodasikan berbagai aspirasi, perkembangan maupun perubahan yang terjadi, yang belum terprediksi dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Sinjai tahun 2013-2018.

Akhirnya, indikator keberhasilan pelaksanaan Renja akan sangat tergantung kepada komitmen dan konsistensi para pelaksana program dan kegiatan sehingga sasaran organisasi yang telah ditetapkan bersama dapat dicapai dengan sebaik - baiknya.

Sinjai, Mei 2016

INSPEKTOR KABUPATEN SINJAI

**ASLAN ABBAS, SH.,MH**

PANGKAT : Pembina

NIP. 19631024 199703 1 002